

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kawasan hutan yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan 2024 diketahui Indonesia memiliki luas lahan berhutan mencapai 95,5 Juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan (Kementerian Kehutanan, 2025). Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kondisi geografis Indonesia yang unik dimana berada di antara dua benua yaitu Australia dan Asia, dan di antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Hutan Indonesia termasuk paling tinggi di dunia setelah Brazil (Anggraini, 2018).

Keanekaragaman hayati Indonesia berfungsi penting untuk menjaga keseimbangan alam, mendukung pendidikan, melestarikan tradisi, serta menjadi tumpuan ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat lokal melalui penyediaan jasa lingkungan. (IBSAP, 2024). Keanekaragaman hayati mencakup kekayaan jenis dan keanekaragaman ekosistem di hutan yang kompleks memiliki pengaruh besar terhadap komunitas organisme, stabilitas, dan perkembangan ekosistem (Rawana *et al.*, 2023). Keanekaragaman hayati yang tinggi khususnya jenis pohon yang bervariasi merupakan salah satu indikator kestabilan ekosistem hutan dimana hutan mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik (Safe'i *et al.*, 2021).

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas yang tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan beragam habitat serta tipe ekosistem yang tersebar di wilayahnya (Nursanti & Adriadi, 2018). Salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera adalah Sumatera Barat, yang terletak di bagian tengah pulau pada pesisir barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Provinsi ini memiliki kawasan hutan yang luas dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sehingga kelestariannya perlu dipertahankan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.342.893 hektare

dimana kawasan hutan tersebut meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi pepohonan yang menempati kawasan tertentu dan memiliki lingkungan yang berbeda dengan kondisi di luar hutan (Kusmana *et al.*, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan dengan sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan serta memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan sekitarnya sehingga unsur-unsur di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hutan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan peran penting sebagai penjaga keseimbangan keberlanjutan kehidupan di muka bumi dengan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan menyerap karbondioksida, tempat hidup berbagai flora dan fauna, penanggulangan bencana serta menjaga keberlangsungan siklus biokimia dan siklus air (Ahada & Zuhri, 2020).

Pada saat sekarang ini, fungsi hutan tidak lagi berjalan dengan baik karena meningkatnya alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan industri karena pertumbuhan penduduk yang pesat yang menuntut kebutuhan akan lahan baik untuk tempat tinggal maupun untuk kebutuhan pangan (Junedi *et al.*, 2025). Hal ini menyebabkan kerusakan hutan dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan menyebabkan terganggunya fungsi ekologi seperti sistem perakaran pohon-pohon di hutan terganggu sehingga terjadi erosi dan banjir karena gagal dalam mengurangi kecepatan aliran air. Selain itu, kerusakan hutan dapat mengurangi penyerapan dan penyimpanan karbon oleh tumbuhan sehingga mempengaruhi aktivitas biologis tanaman (Ridlo *et al.*, 2023).

Salah satu solusi konservasi di tengah meningkatnya ancaman terhadap hutan dan tekanan terhadap pembangunan sumber daya adalah mengadaptasi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau hutan kemasyarakatan (HKm) Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan di Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh

Masyarakat Setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan (Hidayat, 2015). Penerapan skema HKm diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta mendukung peningkatan kondisi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana desa, pemanfaatan hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi untuk dipasarkan, serta penciptaan peluang kerja bagi masyarakat sekitar kawasan (Martapani *et al.*, 2021). Salah satu kawasan HKm yang terdapat di Sumatera Barat adalah HKm Puncak Talau yang berlokasi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh. Kawasan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6946 Tahun 2024 dengan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai 193 hektare.

Vegetasi merupakan komunitas tumbuhan yang menempati suatu ekosistem, dengan pohon sebagai salah satu komponen biotik yang dominan (Chairul & Najah, 2025). Dalam suatu tegakan hutan, pohon menjadi salah satu penyusun utama bersama dengan tingkat sapling, seedling, serta tumbuhan penutup tanah (*ground cover*). Keberadaan pohon berperan dalam membentuk kanopi yang memungkinkan tumbuhan menguasai ruang tumbuh pada suatu kawasan (Rizki & Safitri, 2016). Analisis vegetasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji struktur vegetasi serta komposisi atau susunan jenis tumbuhan dalam suatu kawasan. Penerapan analisis vegetasi bertujuan untuk mengetahui struktur dan komposisi tumbuhan yang dapat memberikan gambaran mengenai fungsi ekologis suatu kawasan (Pertiwi & Chairul, 2023). Selain itu, analisis vegetasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dinamika komunitas tumbuhan dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan serta memperoleh informasi mengenai tingkat keanekaragaman hayati secara lebih terperinci (Sorecha & Deriba, 2017). Analisis vegetasi pada kawasan hutan penting dilakukan sebagai dasar untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang

terdapat di dalamnya, sehingga dapat mendukung upaya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan hutan secara berkelanjutan (Shabirin *et al.*, 2020).

Penelitian telah dilakukan oleh Aristy (2025) mengenai komposisi dan struktur Pohon di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Padang Jariah menunjukkan bahwa pada tingkat pohon ditemukan 9 famili, 13 spesies dan 133 individu dengan famili dominan adalah melastomataceae dengan nilai 30,83% dan Moraceae 20,30. Nilai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi pada tingkat ditemukan pada spesies *Bellucia pentamera* Naudin sebesar 49,09%. Indeks keanekaragaman tingkat pohon di Zona Agroforestry Hutan Kemasyarakatan (HKm) Padang Jariah dikategorikan sedang, dengan indeks keanekaragaman sebesar 2,42.

Penelitian Istomo dan Martha (2023) mengenai komposisi jenis dan struktur vegetasi tingkat pohon di Taman Hutan Raya Dr. Moh. Hatta, Padang, menunjukkan bahwa genus *Shorea*, khususnya *Shorea* sp., merupakan jenis yang dominan. Dominasi tersebut menjadi salah satu karakteristik vegetasi hutan tropis dataran rendah di kawasan tersebut. Dominasi pohon berukuran besar dan adanya variasi diameter menunjukkan kondisi tegakan yang relatif alami sehingga kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi dalam mendukung fungsi konservasi.

Penelitian mengenai analisis vegetasi dan cadangan karbon juga telah dilakukan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Oi Rida Lestari, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan penempatan plot menggunakan metode *Systematic Sampling with Random Start*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dengan nilai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi pada tingkat pohon adalah pulai (*Alstonia scholaris*) dengan nilai sebesar 57,56%. Sementara itu, potensi cadangan karbon pada tingkat pohon berkisar antara 0,03–38,74 ton/ha. Besarnya cadangan karbon tersebut berkaitan dengan kemampuan vegetasi hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga keberadaan tegakan pohon memiliki peranan penting dalam menjaga fungsi ekologis kawasan (Salviana *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai struktur dan komposisi vegetasi tingkat pohon pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Sumatera Barat masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian berjudul “Analisis Vegetasi Tingkat Pohon di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis,

Kota Padang” perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai komposisi jenis dan struktur vegetasi tingkat pohon di kawasan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi keanekaragaman hayati dan kondisi ekosistem kawasan, serta menghasilkan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah untuk penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana komposisi pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau?
2. Bagaimana struktur pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau?
3. Bagaimana keanekaragaman pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui komposisi pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau
2. Untuk Mengetahui struktur pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau
3. Untuk Mengetahui keanekaragaman pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai komposisi, struktur dan keanekaragaman vegetasi tingkat pohon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, pengembangan, dan upaya perlindungan spesies di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Puncak Talau, Kelurahan Limau Manis, Kota Padang.